**PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM OLEH POLDA SUMSEL DALAM MENANGANI KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H )**

**Oleh :**

**ANJELI DERIYANANTI**

**Nim : 1820103089**

****

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**2022**

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya, karena Indonesia negara hukum maka semua aktivitas yang dilakukan oleh mayarakat diatur dalam aturan hukum.[[1]](#footnote-1) Sebagaimana diketahui dalam pembagian hukum terbagi menjadi 2 yaitu pertama *hukum privat*, hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Kedua *hukum publik*, hukum publik adalah sederet aturan yang mengatur bagaimana hubungan warga negara dengan negaranya, yang menyangkut kepentingan umum dalam sifat-sifat hukum.[[2]](#footnote-2)

Sebagaimana dalam aturan hukum pidana yang dikemukakan oleh *Hazewinkel Suringa* bahwa, hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya.[[3]](#footnote-3) Tujuan pidana adalah menegakan ketertiban hukum, melindungi masyarakat hukum, dan mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.[[4]](#footnote-4)

Sebagaimana diketahui bahwa hukum Pidana dibedakan menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. *Vos* mengemukakan bahwa hukum pidana materil ialah termasuk kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang khusus serta ketentuan perundangan lainnya. Hukum pidana materil adalah substansinya, sedangkan hukum pidana formil mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana materil. Tentang bagaimana cara negara alat-alat perlengkapannya yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam menegakan hukum pidana.[[5]](#footnote-5)

Sebagaimana diketahui dalam *Integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif (aspek kepastian hukum) yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga pemasyarakatan), sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, melibatkan sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan, serta saling mempengaruhi antara sub-sub sistem tersebut untuk menjalankan fungsi dan tugasnya.[[6]](#footnote-6) Adapun penegakan hukum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) terdiri dari :

1. Penyelidik dari Lembaga Negara bernama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
2. Penyidik termasuk penyidik pembantu dari Lembaga Negara bernama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Jaksa penuntut umum dari Lembaga Negara bernama Kejaksaan Republik Indonesia untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Hakim dan Pengadilan dari Lembaga Negara bernama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas, menerima, memeriksa, dan memutuskan Perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.
5. Selain itu, ada juga aparat penegak hukum yang bekerja sebagai penasihat hukum, yakni Advokat atau pengacara yang berasal dari kantor-kantor Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bertugas mendampingi, membantu, membela seseorang baik sebagai tersangka, terdakwa atau sebagai korban atau sebagai saksi yang sedang berhadapan dengan proses hukum.[[7]](#footnote-7)

Tugas Kepolisian secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Serta
4. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan.[[8]](#footnote-8)

Sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, bahwa pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara diatur dalam Undang-Undangan ini. Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat, guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.[[9]](#footnote-9) Dengan demikian bahwa tugas Kepolisian dalam proses hukum acara pidana itu ada dua, yaitu proses penyelidikan dan proses penyidikan, dengan tujuan dari proses penyelidikan adalah langkah awal sebelum melakukan penyidikan dan harus mengumpulkan fakta dan bukti. Dan tujuan dari penyidikan untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindari orang yang tidak bersalah dari tindakan yang dibebankan padanya, guna mencari pelaku yang sebenarnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365 Menurut *P.A.F, Lamintan dan Jisman Samosir*, harus memahami bahwa pencurian dengan kekerasan dan pemberatan pada dasarnya merupakan dari unsur pencurian, dengan dibantu faktor lainnya yang membuat ancaman hukuman menjadi lebih serius.[[10]](#footnote-10) Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.[[11]](#footnote-11) Adapun contoh dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dilihat dari beberapa kasus berikut ini :

1. Tim macan komering Polsek Teluk Gelam kejar-kejaran dengan pelaku pencurian dengan kekerasan (Curas). Pelaku Budi Hartono (21) berhasil dilumpuhkan dengan tindakan tegas dan terukur.[[12]](#footnote-12)
2. Polisi mengamankan lima dari delapan pelaku begal yang aksinya sempat viral di media sosial belum lama ini. Tiga di antaranya masih di bawah umur. Kelima tersangka yang diamankan, yakni AJ (22), ZP (21), RM (18), AL (17), dan AF (15). Tiga orang lainnya, termasuk otak pelaku aksi begal tersebut masih dalam pengejaran.[[13]](#footnote-13)
3. Dua dari Lima orang pelaku pencurian dengan kekerasan (Curas), yang meresahkan di kawasan SU I Palembang, diringkus buser Polsek SU I Palembang Senin (27/9/2021) malam. Kedua tersangka yakni Fikri Sunandri alias Andre (27) dan Rian Syafutra (25), warga Kecamatan SU I Palembang. aksi begal yang dilakukan para pelaku ini terjadi (20/9/2021) sekitar pukul 00.10, di Lorong Terusan 1, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan SU I Palembang.[[14]](#footnote-14)

Pencurian dengan kekerasan sudah diatur dalam Pasal 365 KUHP Ayat 1 dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Selain itu, sebagai tindak pidana di mana dua orang atau lebih melakukan kejahatan dan mengambil nyawa orang lain sehingga dapat mengakibatkan kematian maka pelaku dipenjara seumur hidup atau maksimal 20 Tahun yang sudah diatur pasal 365 KUHP.[[15]](#footnote-15)

Berdasarkan Hukum Islam Sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Maidah Ayat 38 yang berbunyi :

**وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ**

“*laki-laki dan perempuan yang mencuri harus dipotong tangan, mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka dan sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana* ( Al-Maidah ayat 38)”.[[16]](#footnote-16)

Pencurian dengan kekerasan termasuk dalam kategori *Jarimah Sariqah* yaitu kejahatan-kejahatan yang diam-diam mengambil barang seseorang dengan cara bertentangan dengan hukum.[[17]](#footnote-17) menurut *Abdul Qadir Audah*, Ada dua macam sariqah menurut syariat Islam, yaitu sariqah yang diancam dengan *had* dan sariqah yang diancam dengan *ta’zir*. Sariqah yang diancam dengan *had* dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar, pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam sementara itu pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan, pencurian jenis ini juga disebut perampokan.[[18]](#footnote-18)

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut dikarenakan banyaknya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Palembang. Dan penulis memilih lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu sebelumnya penulis memang tertarik untuk melakukan penelitian dikarenakan lokasi tersebut mudah dijangkau, dan penulis sudah melakukan observasi terlebih dahulu dikarenakan penulis pernah melaksanakan magang ( KKL) sehingga penulis tertarik karena penelitian ini akan lebih mudah untuk dilakukan. Dan lokasi tersebut juga di indikasi sering menangani kasus-kasus pencurian dengan kekerasan.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga penulis memilih judul **“*Praktek Penegakan Hukum oleh Polda Sumsel dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan”.***

1. **Rumusan Masalah**

Menurut penjelasan latar belakang di atas, sehingga dapat dirumuskan masalah berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Reskrimum Subdit 3 Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap pelaku tindak pidana pecurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Reskrimum Subdit 3 Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap pelaku tindak pidana pecurian dengan kekerasan.
2. Mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Manfaat penelitian ini yaitu agar bermanfaat serta berguna bagi masyarakat terkhususnya masyarakat yang luas terutama bagi saya sendiri. Dapat kita lihat subjek penelitian dapat dijelaskan berupa:

1. Secara teoritis

Tempat sumber informasi bagi akademis, tetapi juga sebagai bentuk pertimbangan peneliti lebih lanjut. memperluas pengetahuann perpustakaan.

1. Secara praktis
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan untuk menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan khususnya.
3. Bagi penulis, penelitian diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat.
4. **Penelitian Terdahulu**

Studi yang berfokus pada analisis pencurian dengan kekerasan telahdilaksanakan dalam beberapa peneliti di Indonesia, peneliti mencantumkan tiga skripsi yang ada sebagai penelitian sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan, adalah sebagai berikut:

* 1. Fitriani. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar .“*Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak Persfektif hukum Islam”*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. dan bagaimana cara menangulangi agar tidak ada lagi terjadinya pencurian ddengan kekerasan oleh anak-anak. Dan persamaan dengana peneliti adalah menjelaskan hukuman pencurian dengan kekerasan dalam Hukum Islam.[[19]](#footnote-19)
  2. David Chrisna Pangihutan Lumban gaol. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Selatan. “ *Analisis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi (Studi putusan nomor 3629/ PID.R/2019/PNMDN dan nomor 296/PID.B/2020/PN MDN)”.* Masalah penelitian ini menggambarkan faktor penyebab dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindak pidana pencurian. Dan apa keputusan Pengadilan Negeri Medan jika terjadi pencurian dengan kekerasan. Dan persamaan dengan peneliti adalah menjelaskan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.[[20]](#footnote-20)
  3. Dian Lestari. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar. “*Tindak Pencurian dengan Kekerasan ( Studi Putusan NO. 51/PID.B/2012/PN. SUNGGUMINASA )”.* masalah penelitian ini menjelaskan bagaimana keputusan hakim dalam puutusan nomor 51/PID.B/2021/PN.SUNGGU MINASA dalam pencurian dengan kekerasan. Dan bagaimana pertimbangan hakim terhadaap pelaku pencurian dengan kekerasan dengan berbagai barang bukti. Dan persamaan dengan peneliti adalah menjelaskan bagaimana tindak pencurian dengan kekerasan. [[21]](#footnote-21)

1. **Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini dengan bantuan *penelitian yuridis dan empiris*, diperlukan langkah-langkah berikut :

1. **Jenis Penelitian**

Menurut *Surjono Soekanto*, jenis penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua jenis : *yuridis empiris dan yuridis normative*. Penelitian *yuridis empiris* yaitu penelitian yang dilakasanakan melalui penyelidikan lapangan untuk mengamati apa yang terjadi di lapangan. Sedangkan *yuridis normative* melakukan penelitian bahan pustaka dan data sekunder yang menjadi dasar penelitian dengan menelusuri aturan dan literatur yang terkait dengan subjek penelitian[[22]](#footnote-22). Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* yaitu dengan cara mengamati apa yang terjadi di lapangan.

1. **Jenis Data dan Sumber Data**
2. **Jenis data**

Menurut *Syofian Siregar*, di buku *Zainudin Ali* bahwa jenis data dapat dibedakan 2 macam :

1. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal (lisan/kata) bukan dalam bentuk angka.
2. Data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.[[23]](#footnote-23)

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *data kualitatif* yang mana data tersebut bersifat uraian, pendapat, konsep, dan penjelasan terutama yang berkaitan dengan masalah tinjaun hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum bagi pelaku tindak pencurian dengan kekerasan.

1. **Sumber Data**

Menurut *Sugiyono*, ada dua sumber data yang dapat digunakan untuk penelitian, yang pertama *sumber data primer* yaitu adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek. Kedua *sumber data sekunder* yaitu memperoleh data yang tidak dapat diakses secara langsung oleh orang lain atau pengumpul data, seperti dokumen*.[[24]](#footnote-24)*

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dengan dilengkapi sumber data sekunder. Dalam rangka untuk mendekati data sekunder ini penulis menggunakan metode pendekatan sumber bahan hukum. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

* 1. Bahan hukum primer, adalah hasil yang mengikat secara hukum. Adapun yang dapat kita gunakan dalam penelitian :

1. Hukum Islam:
2. Al-quran
3. Hadist
4. Ijma’
5. Hukum formal
6. Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ).
7. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
8. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang fungsi tugas pokok Kepolisian.
   1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu penjelasan Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981 dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ).
   2. Bahan hukum tersier adalah bahan yang meliputi penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti bahan dari buku-buku, majalah, internet, kamus-kamus, dan sebagainya.[[25]](#footnote-25)
9. **Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data serta diperlukan informasi mengenai masalah dan pembahasan dalam penulisan ini, penulis memilih untuk meneliti di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

1. **Populasi dan Sampel Penelitian**

Menurut *Netra* populasi adalah suatu kesamaan pribadi yang umum dan cenderung memiliki ciri-ciri yang sama*.* Populasi adalah suatu objek atau subjek di suatu daerah yang telah ditunjukan oleh penelitian untuk memenuhi syarat-syarat tertentu.[[26]](#footnote-26) Jadi dalam populasi ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Menurut *Buran Bungin*, sampeladalah dari bagian populasi yang ada dan mempunyai karakter yang sama dengan sampel. Penelitian ini memakai *sampel purposive sampling* ditentukan merurut karakter dari populasi yang banyak agar dapat memperoleh tujuan peneliti.[[27]](#footnote-27) Sampel yang diambil berjumlah 5 orang yaitu 1 Orang Kanit Subdit 3 Jatanras Bapak Kompol I Putu Suryawan S.H.,S.Ik, 2 orang penyidik Bapak Briptu Didi Idris S.E dan Briptu Ridho S S.H serta 2 orang penyelidik Bapak Bripka Bambang S dan Aipda Popi Oktarino yang menangani masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data. Ada 3 fakta untuk pengumpulan data dalam penelitian hukum:

1. Observasi: Pengertian observasi menurut *Suharsimi Arikunto*, adalah mengamati secara langsung suatu objek pada lingkungan atau tahap penelitian saat ini dengan seluruh panca inderanya. pengamatan dilakukan secara sadar sesuai dengan kaidah pengamatan yang berlaku.[[28]](#footnote-28)
2. Wawancara: Menurut *Sugiyono*, wawancara adalah pertemuan antara dua orang dengan sesi tanya jawab untuk berbagi informasi dan ide untuk kembali pada kesimpulan dan makna topik tertentu. Tujuan wawancara ini adalah agar mendapatkan informasi yang akurat dari sumber-sumber yang telah ditentukan.[[29]](#footnote-29)
3. Dokumentasi: Menurut *Sugiyono*, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dokumen sejarah, tulisan, catatan harian, maupun kebijakan, sedangkan dokumentasi berbentuk gambar dapat berupa foto, sketsa, dan lain-lain.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *teknik wawancara* agar mendapatkan informasi yang akurat dari sumber-sumber yang telah ditentukan dengan dibantu *teknik dokumentasi* dengan mengumpulkan data-data dari berbagai dokumen dan berbentuk gambar.

1. **Teknik Analisis Data**

Menurut *Saifudin Azwar*, analisis data adalah upaya perubahan data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam memahami sifat data dan untuk memecahkan permasalahan khusus berhubungan dengan penelitian.[[30]](#footnote-30) penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *metode kualitatif* yang menjelaskan, menganalisis, semua masalah yang berkaitan, bukan hanya penalaran induktif. dengan kata lain, menyimpulkan msalah khusus ke dalam masalah umum. Kami berharap ini meringankan masalah spesifik yang diuraikan dalam penelitian ini.

1. **Sistematika Penulisan**

Mengikuti pedoman penulisan skripsi, penulis membagi skripsi menjadi 5 bab. Bagian antar bab diatur secara logis. Setiap bab disusun menjadi bagian-bagian pembahasan, dan untuk lebih jelasnya sistem penulisan yang abstrak yang berisi :

**BAB 1: Pendahuluan**

Pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan untuk bahan informasi sementara berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, juga dilampirkan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Umum**

Inilah landasan teori untuk menganalisis masalah yang dibahas seperti, pengertian pencurian dengan kekerasan, unsur pencurian dengan kekerasan, jenis pencurian, sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut KUHP. Pencurian dengan kekerasan dari sudut pandangan pencurian dalam Hukum Islam. Faktor terjadinya pencurian. Penegakan Hukum.

**BAB III : Gambaran Umum lokasi penelitian**

Menjelaskan sejarah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, gambaran Satuan Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Visi dan Misi serta struktur organisasi Unit Jatanras, tugas dan fungsi terpenting, fasilitas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk program keagamaan.

**BAB IV :** **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Termasuk penegakan hukum oleh Satuan Reserse Kriminal Umum Subdit 3 Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap pelaku pencurian dan kekerasan, serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pelaku pencurian dengan kekerasan.

**BAB V : PENUTUP**

Penulis ingin mengambil kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dan memberikan saran dengan harapan agar pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini dapat menerima sebagai sumber untuk perbaikan.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM**

1. **Penegakan Hukum**
   * 1. **Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum, Peraturan hukum itu perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, dan penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan.[[31]](#footnote-31)

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.[[32]](#footnote-32)

* + 1. **Unsur Penegakan Hukum**

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweekmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individual dan tidak menyamaratakan.[[33]](#footnote-33)

* + 1. **Tujuan Penegakan Hukum**

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya menurut beliau, bahwa tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbrugh sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni :

* + - 1. Kepastian Hukum
      2. Keadilan, dan
      3. Daya Guna.[[34]](#footnote-34)
    1. **Macam – Macam Lembaga Penegakan Hukum**
    2. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang- 16 Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP. Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.” Tujuan Penegakan Hukum.

* + 1. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”. Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

* + 1. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, 14 hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

* + 1. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

* + 1. Lapas ( Lembaga Pemasyarakatan )

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 15 No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

1. **Pengertian Pidana dan Pemidanaan**
2. **Pengertian Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* ( belanda ), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan ( nestapa ) yang sengaja dikenakan/ dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam dalam ranah hukum pedata, administrasi, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.[[35]](#footnote-35)

Sebagaimana halnya pengertian istilah pidana menurut pendapat *Satochid* Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut,yaitu :

* + - 1. Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman
      2. Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yag dilarang.[[36]](#footnote-36)

Sebagaimana menurut *Tri Andrisman* pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi angota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.[[37]](#footnote-37) Sedangkan pendapat *Van Hamel* dalam *P.A.F. lamintang* mempertegas pengertian pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.[[38]](#footnote-38)

Berdasarkan definisi tersebut diatas menurut *Muladi* dan *Barda Nawawi Arief* dapatlah diartikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagi berikut :

* + - * 1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaanpenderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
        2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan yang berwenang; dan
        3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.[[39]](#footnote-39)

1. **Pengertian Pemidanaan**

Pemidanaan didalam Hukum Indonesia merupkan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman, Menurut *Prof Sudarto,* bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumanya”.[[40]](#footnote-40)Istilah penghukuman dapat pula dipersempit artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, namun kata penghukuman dalam perkara pidana mempunyai makna yang sama atau bersinonim dengan kata pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim. Menurut *Jan Remmelink*, pemidanaan adalah pengenaan scara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.[[41]](#footnote-41)

Sebagaimana halnya arti lain dari pemidaan adalah serangkaian tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Sementara *L.H.C. Hulsman* mendefinisikan sistem pemidanaan (*the sentencing system*) sebagai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.[[42]](#footnote-42) Sedangkan menurt *Andi Hamzah*, pemidanaan sama halnya dengan penjatuhan pidana. Pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai itu, bagaimana pelaksanaan pidana itu kepada terpidana danbagaimanakah membina narapidana sehingga dapat diubah menjadi manusia ang berguna dalam masyarakat Pancasila ini.[[43]](#footnote-43)

1. **Tujuan Pidana dan Pemidanaan**
   * 1. **Tujuan Pidana**

Menurut *Remmelink* hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.[[44]](#footnote-44) Dalam literatur berbahasa inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation* yaitu memperbaiki atau memrehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Kedua *Restraint* yaitu mengasingkan pelanggaran dari masyarakat. Ketiga *Restribution* yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Dan terakhir *Deterrence* yaitu menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihatpidana yang dijatuhkan pada terdakwa[[45]](#footnote-45)*.*

Sebagaimana halnya yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang variasi dari bentuk-bentuk : penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menajdi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformas*i) kepada penjahat.[[46]](#footnote-46) Sedangkan menurut *Muladi dan Barda Nawawi Arief,* dalam buku “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, menyebutkan bahwa pada hakikatnya pidana mempunyai dua tujuan utama, yaitu:

1. untuk memengaruhi tingkah laku.
2. untuk menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik ini dapat berupa perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antarsesama manusia.[[47]](#footnote-47)

Sebagaimana dalam tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat, tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia, dan tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

* + - 1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

* + - 1. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.[[48]](#footnote-48)

* + 1. **Tujuan Pemidanaan**

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan sesuatu pemidanaan, yaitu:

* + - * 1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
        2. Untuk membuat orang jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan
        3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain.[[49]](#footnote-49)

Sesuai dengan apa yang dikatan oleh *Barda Nawawi Arief*, bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari politik kriminal. Dalam arti kseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maaka tidak lepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.[[50]](#footnote-50)

Sebagiamana dalam revisi Undang-Undang Tahun 2019 menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 yang berbunyi :

* + - 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat.
      2. Memasyarakatan terpidana dengan mengadakan pembina dan pembimbing agar menjadi orang yang baik dan berguna.
      3. Menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
      4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sedangkan tujuan pemidanaan menurut *Wirjono Prodjodikoro* yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.[[51]](#footnote-51)
3. **Jenis-Jenis Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yangmempunyai kekuasaan (berwewenang), berupa pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telahmelakukan pelanggaran kaidah hukum atau tindak pidana menurut Undang-Undang.[[52]](#footnote-52) Jenis- jenis sanksi pidana dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP yang menentukan adanya pidana pokok dan pidana tambahan terdiri dari :

* 1. Pidana pokok
     + 1. Pidana mati

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik zaman hukuman romawi, yunani, jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu itu sangat kejam, terutama pada zaman kaisar romawi, cukup terkenal sejarah zaman nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati. Adapun beberapa alasan orang-orang yang menentang hukuman mati antara lain :

* + - * 1. Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki apabila ternyata di dalam keputusannya hukum tersebut mengandung kekeliruan.
        2. Pidana mati itu bertentangan dengan pri kemanusiaan
        3. Dengan menjatuhkan pidana mati akan tertutup usaha untuk memperbaiki terpidana
        4. Apabila pidana mati itu dipandang sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut adalah keliru karena pidana mati biasanya dilakukan tidak di depan umum
        5. Penjatuhan pidana mati biasanya mengandung belas kasihan masyarakat yang dengan demikian mengundang protes-protes pelaksanaannya
        6. Pada umumnya kepala negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana terbatas maupun pidana seumur hidup.[[53]](#footnote-53)

Alasan-alasan bagi mereka yang pro pidana mati pada umumnya dikemukakan sebagai berikut :

1. Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi, masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh terpidana karena ia sudah mati.
2. Pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah.
3. Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.
4. Dengan pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan.[[54]](#footnote-54)

Terlepas dari alasan yang pro dan kontra dari pidana mati di atas. Pelaksanaan pidana mati sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, harus dengan keputusan presiden, meskipun terpidana menolak untuk memohon grasi dari presiden, hal ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Gradasi No. 3 Tahun 1950 L.N. No. 40 Tahun 1950 ditentukannya ketentuan ini di dalam Undang-undang Grasi, berarti bahwa terpidana tidak memohon grasi, niscaya kesalahan hakim sejauh mungkin harus di cegah dengan cara turun tangannya presiden. Bukan berarti turun tangannya presiden mencampuri bidang peradilan, tetapi suatu upaya hukum yang khas di luar hukum acara pidana yang menjadi wewenang khusus presiden berdasarkan Pasal 14 UUD 1945 dan peraturan pelaksanaannya yang di atur dalam Undang-undang Grasi tersebut.[[55]](#footnote-55)

* + - 1. Pidana penjara

Menurut *P.A.F. Lamintang* mengemukakan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.[[56]](#footnote-56)

Adapun sistem penjara dikenal dengan berbagai variasinya yakni sebagai berikut:

1. Sistem Pennsylvania

Sistem Pennsylvania ini lazim juga disebut sistem sel. Sel adalah kamar kecil untuk seorang, jadi orang-orang dipenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindari penularan pengaruh jahat.

1. Sistem Auburn

Sistem ini terpidana menjalankan hukumannya di sel masing-masing tetapi pada waktu malam saja. Siang hari terpidana bersama dengan yang lain tetapi dilarang untuk saling berbicara. Sistem ini dikenal juga dengan silent sistem.

1. Sistem Progresif

Peralihan dari pidana penjara kepada pembebasan dilakukan secara berangsur-angsur, sehingga peralihan itu dirasakan oleh terpidana. Kesemuanya ditujukan agar terpidana betul-betul menyiapkan dirinya untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat.[[57]](#footnote-57)

* + - 1. Pidana kurungan

Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya saja perbedaannya terletak pada sifat hukuman pidana kurungan yang lebih ringan dan ancaman hukumannya pun ringan dari pada pidana penjara. Dalam Pasal 18 KUHP dinyatakan bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan.[[58]](#footnote-58)

* + - 1. Pidana denda

Hal yang menarik dalam pidana denda antara lain di tetapkannya jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat diangsur. Pokok-pokok pidana denda sesuai rancangan KUHP yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit seribu lima ratus rupiah.
2. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu

Kategori I, seratus lima puluh ribu rupiah;

Kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;

Kategori III, tiga juta rupiah;

Kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah;

Kategori V, tiga puluh juta rupiah;

Kategori VI, tiga ratus juta rupiah

1. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
2. Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :
   * + - 1. Pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun adalah denda kategori V;
         2. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun adalah denda kategori VI;
         3. Pidana denda yang paling sedikit adalah kategori IV.[[59]](#footnote-59)
       1. Pidana tutupan

Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat

dijatuhkan apabila (Rancangan KUHP) :

1. Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan;
2. Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Pengecualian terhadap ketentuan di atas adalah jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.[[60]](#footnote-60) Tempat dan cara menjalankan pidana ini di atur tersediri dalam PP 1948 No. 8. Dalam peraturan ini narapidana diperlakukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang rokok, pakaian sendiri, dan sebagainya. Rumah tutupan itu hingga sekarang belum ada sehingga pidana tutupan tidak dapat dijalankan.

* 1. Pidana tambah
     + 1. Pencabutan hak-hak tertentu

Hak-hak yang dapat di cabut itu tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu:

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu ( pemberhentian dari jabatan, berdasarkan putusan hakim itu dilakukan oleh atasan yang bersangkutan)
2. Hak masuk angkatan bersenjata (A.B)
3. Hak pilih: aktif dan pasif
4. Hak jadi penasehat, wali, wali pengawas, kurator anaknya.
5. Kuasa bapak, wali dan curatele atas anak (No. iv dan v ini tidak dapat dilakukan atas orang yang berlaku B.W., Pasal 35 ayat 2)
6. Hak melakukan pekerjaan tertentu.
   * + 1. Perampasan barang-barang tertentu

Di antara pidana tambahan, maka pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu ini yang terbanyak dijatuhkan. Pasal 39 menentukan dalam hal apa pidana perampasan barang-barang tertentu ini dapat dijatuhkan:

Ayat 1 : barang kepunyaan terpidana, yang:

1. Diperoleh dengan kejahatan, atau
2. Yang disengaja di pakai akan melakukan kejahatan

Ayat 2 : jika dijatuhkan pidana lantaran kejahatan tiada sengaja atas pelanggaran hanya dapat dijatuhkan pidana merampas barang-barang yang tertentu itu, kalau ditentukan dalam pasal-pasal yang bersangkutan.[[61]](#footnote-61)

* + - 1. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim yang dimaksud ialah publikasi ekstra dari putusan hakim itu. Hakim bebas menentukan di mana atau bagaimana publikasi itu harus dijalankan. Biayanya dibebankan kepada narapidana, maksud pidana ini ialah disamping mencegah orang lain berbuat jahat, juga supaya masyarakat umum berhati-hati. Tidak tiap putusan dapat di publikasikan ekstra itu, tetapi hanya yang tegas disebutkan dalam undang-undang.[[62]](#footnote-62)

1. **Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**
2. **Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Dalam konsep Hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana sebagai istilah *Strafbaar Feit,* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mengunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.[[63]](#footnote-63) Didalam Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Stafbaar Feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik. Delik berasal dari kata bahasa latin yakni kata delictum.[[64]](#footnote-64)

Menurut *Moeljatno,* perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut, Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan atau pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.[[65]](#footnote-65) Sementara *Menurut Roeslan* *Saleh*, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikendaki oleh hukum.[[66]](#footnote-66) Hukum pidana terbagi menjadi 2 yaitu pertama hukum pidana materil, merupakan hukuman yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan yang dapat di pidana, aturan yang memuat syarat-syarat sehingga dapat menghasilkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan dan sumber hukum materiil berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum.[[67]](#footnote-67)

Sebagaimana dalam pendapat *Lamintang* mengenai pengertian tindak pidana mengandung 2 (dua) unsur, yaitu : *unsur obyektif* dan *unsur subyektif*. *unsur obyektif* berkaitan dengan obyek dari tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, unsur subyektif berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang selanjutnya akan dikenai sanksi pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya.[[68]](#footnote-68)

*Moeljatno* mengemukakan bahwa menurut sifatnya, perbuatan pidana ini merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif). Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Peraturan Perundang-Undangan Pidana lainnya yang merupakan ketentuan Hukum Pidana di luar KUHP.[[69]](#footnote-69)
3. **Pengertian Kekerasan**

Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan, Tenaga badan adalah kekuatan fisik, penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya.[[70]](#footnote-70)Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan, menurut *A.S. Alam*, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu: dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam Perundang-Undangan pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. Kemudian dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*) dalam masyarakat bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain cidera atau bahkan mati, hal ini disebabkan karena kekerasan merupakan perbuatan menggunakan tenaga badan yang tidak ringan.Tenaga badan adalah kekuatan fisik, kemudian, kekerasan yang dimaksudkan disini adalah kekerasan yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.[[71]](#footnote-71)

1. **Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian, akan tetapi substansi yang ada dalam tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian, perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat, tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.[[72]](#footnote-72)

1. **Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: *unsur obyektif* (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan *unsur subyektif* (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

1. Unsur obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*Wegnemen*), dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil, mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.[[73]](#footnote-73)

Sebagaimana halnya aktivitas tangan dan jari-jari yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil, unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna seperti yang dijelaskan oleh *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.[[74]](#footnote-74)

1. Unsur subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *Opzet Als Oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki, kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. dalam tindak pidana pencurian pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (*subyektif*) saja, sebagai suatu unsur subyektif bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.[[75]](#footnote-75)

1. **Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).**

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan keahlian tertentu dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan, pencurian dengan keahlian tertentu menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa, Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan keahlian tertentu ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya, pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.[[76]](#footnote-76)

Sebagaimana dalam Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memepermudah Pencurian.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun :
3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau kendaraan yang sedang berjalan.
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
6. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
7. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun.
8. Diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 ( dua puluh ) tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.[[77]](#footnote-77)
9. **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana Islam**
10. **Pengertian Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.[[78]](#footnote-78) Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara’ (Al Qur’an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta’zir. Istilah lain yang sepadan dengan istila jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan Syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir.

Sebagaimana pengertian dari hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan batas , jenis dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman itu tidak bisa ditambah , dikurangi oleh siapapun dengan contoh hukuman had berupa had zina, dihukum bagi yang ghairu muhsan 100 kali cambuk dan muhsan dihukum rajam, had qadhafÂ (menuduh orang berbuat Zina) dihukum 80 kali cambuk, had sariqah (pencurian), apabila sudah mencapai nisab dihukum potong tangan, had minum khamar dihukum 40 kali cambuk. Sedangkan pengertian ta’zir adalah adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa contohnya seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.

1. **Pencurian Dengan Kekerasan ( Hirabah )**
   1. **Pengertian Hirabah**

Menurut *Abd Al Qadir Audah dan Al Sayid Sabid* yaitu, *Hirabah* dikenal dengan istilah pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan kekerasan dan ini juga disebut dengan Pencurian dengan kekerasan atau begal, walaupunn tindak pidana hirabah dinamakan pencurian besar (*Sariwah Kubra*), ia tidak benar-benar mirip dengan pencurian, pencurian adalah keluar (rumah) untuk mengambil harta secara paksa.[[79]](#footnote-79)

Dalam istilah *Syara’* merampok di sebut *Qat’uttariq* yang artinya “memotong jalan’’ atau “menjegal” atau disebut *Hirabah* yang artinya“peperangan”, adapun secara istilah adalah mengambil harta orang lain dengan cara paksa, kekerasan, ancaman senjata, penganiayaan bahkan kadang dengan membunuh pemilik barang, sedangkan menurut Imam Abu Hanafi, Ahmad bin Hambal, dan ulama Syi’ah Zaidiyah mendefinisikan *Hirabah* adalah keluarnya seseorang untuk mengambil harta secara kekerasan jika keluarnya menimbulkan ketakutan pengguna jalan,mengambil harta, atau membunuh orang, Sebagian Ulama mendefiniskan bahwa *Hirabah* adalah upaya menakut-nakuti orang dijalan untuk mengambil hartanya.[[80]](#footnote-80)

Menurut buku yang berjudul *tindak pidana dalam syariat Islam karya Abdul Rahman* , *Hirabah* adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok atau seseorang yang bersenjata yang mungkin akan menyerang musafir atau orang yang berjalan dijalan raya atau ditempat manapun dan mereka merampas harta korbannya dan apabila korbannya berusaha lari dan mencari atau meminta pertolongan maka mereka akan menggunakan kekerasan.[[81]](#footnote-81)

Sedangkan dalam buku *Fiqh Jinayah ( upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam )* karya A.Djazuli , *Hirabah* adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan, Jadi hirabah itu adalah suatu tindak kejahatan atau pengrusakan dengan menggunakan senjata ataupun alat yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan oleh satu orang atau keelompok tanpa mempertimbangkan dan memikirkan siapa korbannya disertai dengan kekerasan.[[82]](#footnote-82)

* 1. **Syarat-Syarat Hirabah Yang Dapat Dijatuhkan Hukuman**

Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku *hirabah* terdapat beberapa syarat yaitu :

* + - * 1. Pelaku hirabah adalah orang mukallaf

Mukallaf adalah syarat untuk dapat ditegakan suatu had padanya, kemudian mukallaf adalah Orang yang berakal dan dewasa, anak kecil dan orang gila tidak bisa dikatakan pelaku hirabah yang harus di had, meskipun dia terlibat dalam sindikat hirabah karena anak kecil dan orang gila tidak bisa dibebani atau di hukum menurut syara.

* + - * 1. Pelaku hirabah membawa senjata

Untuk dapat menjatuhkan had hirabah disyaratkan pula bahwa dalam melancarkan hirabah pelakunya terbukti membawa senjata, karena senjata itulah yang merupakan kekuatan yang diandalkan olehnya dalam melancarkan hirabah bila pelaku tidak membawa senjata maka tindakannya tidak bisa dikatan hirabah.

* + - * 1. Lokasi hirabah jauh dari keramaian

Sebagaian Ulama mengatakan bahwa lokasi hirabah harus ditempat yang jauh dari keramaian, sebab apabila terjadi tindak kejahatan di tempat keramaian maka korban bisa meminta bantuan sehingga kekuatan pelaku kejahatan dapat dipatahkan, tetapi sebagian Ulama mengatakan bahwa tindak kejahatan ditempat keramaian sama saja bernama *hirabah* karena Ayat mengenai hirabah ( Al-Maidah Ayat 33 ) secara umum menyangkut segala *hirabah* baik ditempat yang jauh dari keramaian maupun di tempat keramaian.

* + - * 1. Tindakan hirabah secara terang-terangan

Tindakan *hirabah* harus dilakukan secara terang-terangan sesungguhnya tidak dapat dikatakan hirabah apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi, adapun perbuatan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dikatakan sebagai perbuatan mencuri, apabila pelaku merebut harta kemudian melarikan diri maka itu disebut dengan penjambret atau perampas.[[83]](#footnote-83)

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

**KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN ( SUBDIT 3 JATANRAS POLDA ) KOTA PALEMBANG**

1. **Sejarah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan**

Sejarah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dimulai pada masa penjajahan Belanda keadaannya tidak jauh berbeda dengan kondisi kepolisian yang ada di Nusantara letaknya di Kota-kota besar lainnya. Struktur dan susunan organisasi dibentuk berdasarkan hasil dari kesatuan kepolisan yang beberapa kali reorganisasi. Pada masa Belanda ada beberapa jenis kesatuan Polisi diantaranya Polisi Lapangan, Reserse Daerah, Polisi Kota, dan Polisi Umum.

Pembentukan Kesatuan Kepolisian disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah Sumatera Selatan. Tujuannya agar melindungi orang-orang belanda yang bekerja bagi kolonial. Sumatera Selatan sendiri mencakup tiga keresidenan, yaitu keresidenan Palembang, Lampung, dan Bengkulu. Di dalam wilayah keresidenan Palembang terdapat beberapa tempat controleur di antaranya di Lubuk Linggau, Lahat, Pagar Alam, Tebing Tinggi, Baturaja, Kayu agung, Sekayu, Belitung, dan Pangkal Pinang.

Kendati keresidenan Palembang sebagai pusat Provinsi Sumatera Selatan tetapi antara kepolisian keresidenan yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan sama sekali. Sebab, secara operasional masing-masing residen menentukan corak organisasi kepolisiannya sendiri-sendiri. Jadi, tidak menutup kemungkinan adanya keterpisahan personil antara satu keresidenan dengan keresidenan lainnya. Semua masalah ini ditanggung oleh departemen dalam Negeri. Begitu juga perlengkapan, pakaian seragam, pembinaan personil, pengangkatan, pemutasian, dan pemberhentian ditentukan departemen dalam Negeri. Kekuatan personil polisi, baik di data semen maupun di kepolisian kota tergantung luasnya wilayah kota tersebut.

Perkembangan kepolisian di Sumatera Selatan di masa awal memang tak terlepas dari dinamika perjuangan rakyatnya dalam mempertahankan Kemardekaan RI. Keberadaan kepolisian Indonesia sebenarnya sudah ditetapkan oleh panitia persiapan kemardekaan dalam sidang pada 19 Agustus 1945. Saat itu, ditetapkan jabatan Kepolisian menjadi bagian dari departemen dalam Negeri. Namun karena situasi dan kondisi yang sulit jabatan Kepolisian belum bisa dibentuk. Sementara dimasing-masing daerah berinisiatif membentuk lembaga kepolisiannya.

Pada 21 Agustus 1945 di Palembang, Ak Gani yang dipercaya sebagai Kepala Pemerintahan RI untuk wilayah Sumatera Selatan menetapkan asasi dan Komisaris Polisi RM Moersodo sebagai Kepala Kepolisian di Keresidenan Palembang Pada 23 Agustus 1945. Namun secara resmi Kepolisian Sumatera Selatan baru terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini sesuai dengan pembentukan jabatan Kepolisian Negara setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, pada 10 Juli 1948 Pemerintah RI mengumumkan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan. Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman sistem pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Berdasarkan ketentuan itu, Sumatera dikembangkan menjadi tiga, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang, wilayahnya mencakup keresidenan Palembang, keresidenan Lampung, dan keresidenan Bengkulu. Struktur pemerintahan tersebut diikuti oleh jabatan Kepolisiannya, sehingga Kepolisiannya di daerah Sematera Selatan disebut polisi Provinsi Sumatera Selatan.[[84]](#footnote-84)

Berdasarkan struktur yang ditentukan jabatan kepolisian pusat, maka polisi Provinsi Sumatera Selatan membawahi polisi keresidenan Palembang, Lampung, Bengkulu, Bangka dan Belitung. Masing-masing polisi keresidenan membawahi Polisi Kabupaten di daerahnya masing-masing dan polisi-polisi sub wilayah sebagai ujung tombak dari polisi provinsi. Struktur organisasi ini berlangsung dari tahun 1950-1958, dalam rentang waktu 1950-1958 pada masa demokrasi liberal tersebut, pembangunan Polisi Sumatera Selatan belum begitu mulus. Ini dikarenakan seluruh komponen bangsa masih mengutamakan kemantapan keamanan dalam negeri. Akibatnya, kondisi polisi di Sumatera Selatan masih sangat sederhana. Bahkan, kantor 39 Polisi Provinsi Sumatera Selatan masih dalam keadaan darurat. Kantor tersebut terletak di jalan merdeka sekarang telah dibangun gedung monumen perjuangan rakyat(monpera Palembang), persis di depan masjid agung. Kantornya berbentuk linmas (rumah tradisional Palembang) dan terbuat dari kayu, Dari tempat sederhana inilah komando Kepolisian Sumatera Selatan dijalankan.

Pada 7 Oktober 1997 terjadi perubahan yang signifikan di tubuh polri. Perubahan struktur organisasi polri itu sesuai dengan keputusan panglima ABRI No Kep/10/VII/1997. Dalam perubahan ini terjadi pemekaran Kepolisian Daerah dari 17 menjadi 27 Kepolisian Daerah. Brimob dari 49 kompi menjadi 56 kompi. Akibat pemekaran ini Kepolisian Daerah Sumatera bagian Selatan dibagi menjadi empat wilayah kepolisian, yakni Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepolisian Daerah Jambi, dan Kepolisian Lampung.

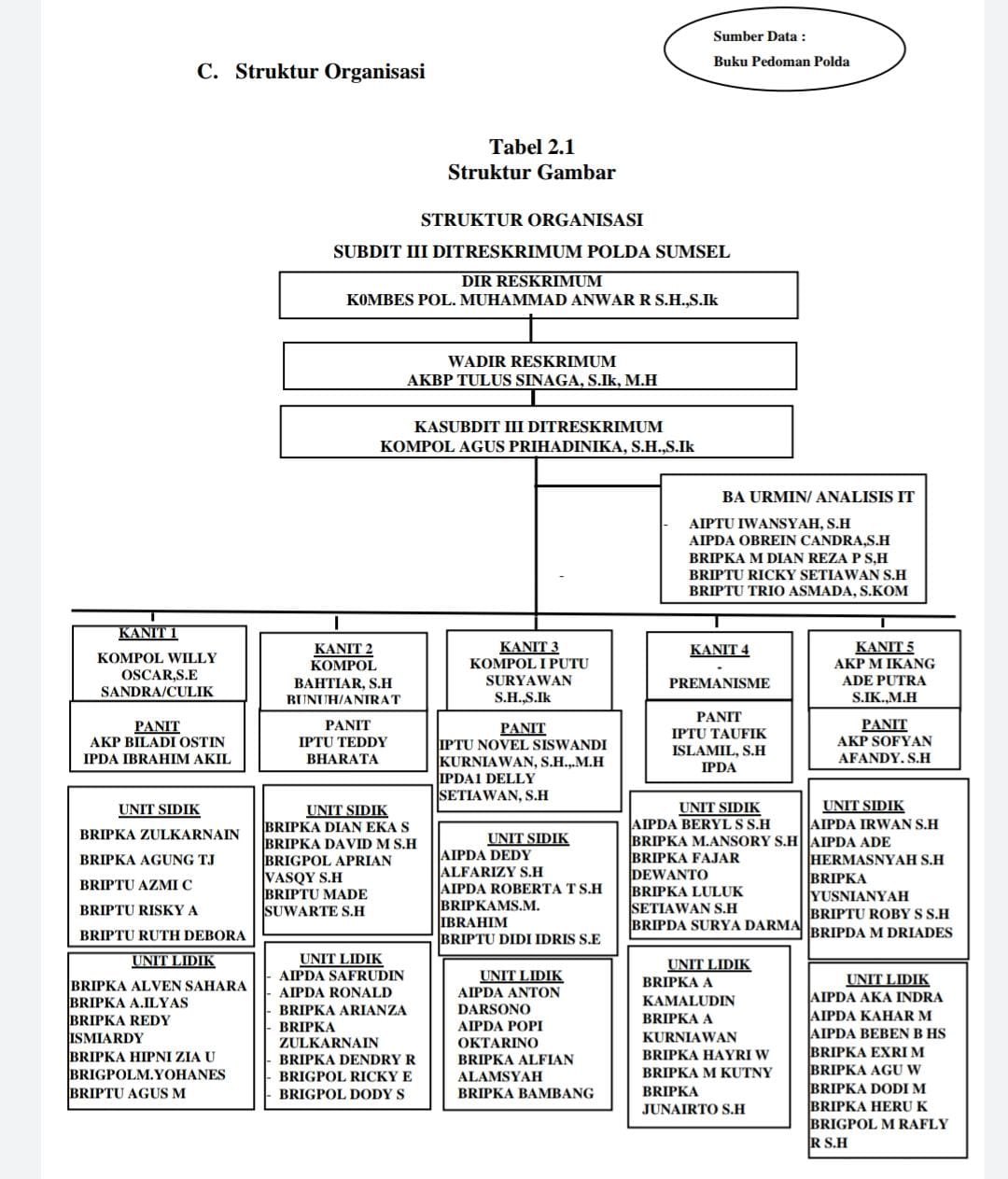
Sebelum pemekaran polisi daerah Sumatera bagian Selatan membawahi 3 kepolisian wilayah (Polwil) yaitu polwil Lampung, Jambi dan Bengkulu. 1 kepolisian kota besar (Poltabes) yang berada di Palembang, 3 kepolisian resort kota (Polresta) yaitu di kota Jambi, Bandar Lampung, dan Bengkulu. Kemudian membawahi 5 polres setingkat polresta, 15 polres standard, 12 polsektif b, 13 polsektif c, 190 polsek standard, 6 KPPP, dan 233 pospol. Dengan adanya pemekaran dan terbentuknya provinsi Bangka Belitung, kepolisi daerah Sumatera Selatan hanya membawahi 1 poltabes dan 13 polres. Melalui perangkat-perangkat inilah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menjalankan misinya sebagai mitra masyarakat, yang mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat Sumatera Selatan.

Kemandirian kepolisian Republik Indonesia diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi harusla dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujutkan kepolisian Republik Indonesia sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil, dan sejahterah. Sejak Januari 2001, Kepolisian Republik Indonesia dipisahkan dari TNI dan menggunakan tanda kepangkatan tersendiri. Perubahan tersebut berdasar pada surat keputusan KAPOLRI No. Pol:Skep/1259/X/2000, tertanggal 3 Oktober 2000 dan setelah itu seluruh kegiatan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelindung, pengayoman, pelayan masyarakat beralamatkan di Mapolda Sumatera Selatan Jln. Jendral Sudirman KM. 3,5 sampai dengan sekarang.

Rohjas yang membawahi suatu bidang kerohanian yang ada pada Mapolda Sumatera Selatan merupakan badan pelaksanaan pelayanan di tingkat POLDA Sumatera Selatan, dengan demikian seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan harus mengacu pada program kerja dan anggaran Mapolda Sumatera Selatan TA 2012, dimana sasaran diarahkan untuk mewujudkan postur POLRI yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam upaya mewujudkan kepercayaan masyarakat, sinergitas kemitraan dan pelayanan prima kepolisian dalam pengabdian, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.[[85]](#footnote-85)

1. **Gambaran Umum Tentang Reserse Kriminal Umum Subdit III Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan**

Unit jatanras reserse kriminal umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan merupakan unit bagian pada satuan kerja direktorat reserse kriminal umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Unit ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan tindak pidana umum. Tindak pidana umum yang dimaksud dalam penelitian ini berhubungan dengan kejahatan dengan kekerasan. Unit III (Jatanras ) direktorat reserse kriminal umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memliki susunan struktural organisasi seperti halnya unit atau bagian kepolisian yang lainnya. Susunan struktural organisasi unit III (Jatanras) direktorat reserse kriminal umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terdiri dari 5 kepala unit III (Jatanras). serta 55 anggota. Tugas dari kepala unit (Kanit) di unit III direktorat reserse kriminal umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yaitu mengawasi kinerja 55 anggota dibawahnya dan bertanggung jawab pula kepada unit jatnras itu sendiri. Unit III (Jatanras ) direktorat reserse kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dipimpin oleh KOMPOL AGUS PRIHADINIKA, S.H.,S.Ik

1. **S**
2. ****
3. **truktur Organisasi**
4. **Visi dan Misi**
5. **Visi dan Misi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan**

Dalam menghadapi perubahan yang cepat, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan harus memiliki pandangan kedepan yang mampu membimbing dan memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi. Sebagai pedoman kedepan telah dirumuskan visi dan misi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan Kamdagri serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif di wilayah Sumatera Selatan.

1. Misi

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi yang mencerminkan koridor tugas-tugas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, sebagai berikut:

1. Membangun kemitraan dengan masyarakat dengan memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat secara mudah, tanggap/responsif serta tidak diskriminatif sehingga terbebas dari gangguan fisik maupun psikis
2. Aparatur pemerintah yang bersih dan baik dalam melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
3. Melaksanakan pemberdayaan dan inovasi tugas–tugas Polri pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah daerahs
4. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
5. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
6. Menegakkan hukum secara professional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
7. Mengelola secara professional, transparan akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri
8. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
9. Membangun sistem sinergi polisional inter departemen dan komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).[[86]](#footnote-86)
10. **Tugas dan Pokok Fungsi**
11. **Tugas dan Fungsi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan**
12. Tugas
13. Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan.
14. Melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Kepolisian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
15. Fungsi
16. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuansatuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
18. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;
19. Pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person* (VVIP), *Very Important Person* (VIP), tempat pariwisata, dan lain-lain.
20. Pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (*Regident*) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar lantas);
21. Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/*Searchand Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan diwilayah perairan;
22. Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan
23. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. **Fasilitas dan Sarana Keagamaan di Mapolda Sumatera Selatan**

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, dalam program keagamaan dakwah kultural di Polda SUMSEL. Ini memerlukan adanya fasilitas dan sarana yang baik untuk mendukung kegiatan-kegiatan kearah pencapaian tujuan. Pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sebagai insan individu dan insan sosial, maka fasilitas dan sarana program keagamaan dakwah kultural personil POLRI dan PNS harus merupakan kesatuan integral yang saling mendukung dan membantu, sehinga akan terwujud keserasian keseimbangan pembinaan antara bidang fisik dan rohani, material dan operasional, sehingga baik jiwa dan semangat perjuangan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat terpelihara dan berkembang dengan baik.

1. Fasilitas

Untuk dapat terselenggara program keagamaan di Polda SUMSEL maka ada beberapa fasilitas yang ada untuk masing-masing bidang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengusahakan adanya tempat/ruang peribadatan pada kesatuan kesatuan dan komplek perumahan/asrama untuk dijadikan tempat anggota melaksanakan ibadah, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan setempat.
2. Memberikan kesempatan serta menganjurkan anggota untuk menunaikan ibadah secara continue dan rutin mengikuti ceramah-ceramah serta kegiatan-kegiatan program keagamaan lainnya.
3. Mengusahakan melengkapi para rohani dengan materi-materi program keagamaan agar dapat dilaksanakan program tersebut secarah terarah dan dicapai tujuan yang telah digariskan.
4. Sarana

Beberapa sarana atau alat-alat yang dapat digunakan dalam program- program keagamaan di Mapolda SUMSEL diantaranya adalah:

1. Komando kesatuan serta organisasi yang baik dan sempurna
2. Komando dan kesatuan yang memiliki sifat kepemimpinan yang terpercaya
3. Para tenaga-tenaga inti program keagamaan personil POLRI dan PNS yang terdidik dengan baik
4. Tenaga ahli program keagamaan yang berpotensi harus seimbang dengan besar kecilnya jumlah anggota dalam kesatuan
5. Kitab-kitab agama, Al-Qur’an, dan buku-buku pelajaran
6. Tempat-tempat peribadatan yang nyaman

**BAB IV**

**PEMBAHASAN**

1. **Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh Unit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Berbicara mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh unit jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Maka, penegakan hukum menurut *Barda Nawawi arie*f, dalam hukum pidana dibagi menjadi 2 yaitu upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal adalah upaya penanggulangan yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif yaitu tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.[[87]](#footnote-87) Sedangkan upaya non penal adalah upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dengan meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.[[88]](#footnote-88)

Sebagaimana pengertian dari Reserse adalah salah satu fungsi dari fungsi Kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyelidikan untuk memecahkan kasus kriminalitas. dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Reserse Kriminal Umum Unit 3 Jatanras dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif, yang di maksud dengan upaya preventif dan upaya represif menurut Bapak Kompol I Putu Suryawan S.H.,S.Ik sebagai Kanit 3 Jatanras Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan yaitu :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta memberikan himbuan terhadap masyarakat yang rentan terhadap kejahatan dengan kekerasan agar menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat, meminimalisir berkembangnya suatu kejahatan dan menekan angka kriminalitas yang terjadi ditengah masyarakat.

1. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu bentuk tindakan atau pengungkapan kasus terhadap para pelaku tindak pidana yang terkait dengan pencurian dengan kekerasan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera.[[89]](#footnote-89)

Sedangkan tugas dari penyelidik menurut Bapak Bambang S sebagai anggota penyelidikan Unit 3 Jatanras Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yaitu penyelidik mempunyai kewajiban membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakannya kepada penyidik terait dengan penangkapan, meninggalkan tempat, penggeledahan, penahanan, pemeriksaan dan penyitaan yang dilakukannya. Namun penyidikan akan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.[[90]](#footnote-90) Sedangkan tugas dari penyidik berdasarkan wawancara bersama bapak Briptu Idris S.E sebagai anggota penyidik adalah :

* + - 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
      2. mencari keterangan dan barang bukti
      3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
      4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Sebagaimana istilah jatanras dalam kriminologi adalah kejahatan dengan kekerasan, namun dalam hukum pidana bahwa jatanras adalah pencurian dengan kekerasan. Sedangkan pengertian dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Bapak Kompol I Putu Suryawan .H.,S.Ik sebagai Kanit Unit 3 Jatanras Reserse Kriminal Umum Sumatera Selatan adalah suatu perbuatan yang menyimpang, merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya.[[91]](#footnote-91) Dan menurut Bapak Aipda Popi sebagai anggota penyelidik Unit 3 Jatanras Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pengertian dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pencurian dengan kualifikasi dan merupakan suatu pencurian pada unsur-unsur memberatkan, pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu menyebabkan bersifat lebih berat yang ancaman pidananya lebih berat dari pada pencurian biasa. Pembuktian pada unsur-unsur tindak pidana dengan pencurian kualifikasi ini diawali yang cara membuktikan pencurian pada bentuk pokok. Pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.[[92]](#footnote-92)

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Bripka Baambang S sebagai anggota Penyelidik Unit jatanras di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bahwasanya sanski pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukumnya sesuai dengan apa yang akan diterapkan.[[93]](#footnote-93)

Namun dalam proses penegakan hukum Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sering mengalami hambatan dalam proses penegakan hukum. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam hal penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan menurut Bapak Kompol I Putu S sebagi Kanit 3 Unit Jatanras Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Faktor eksternal

Faktor eksternal yaitu yang pertama minimnya saksi pada saat pengungkapan kejahatan pencurian dengan kekerasan khususnya pada saat pengumpulan alat bukti, pihak penyidik seringkali kesulitan atau bahkan tidak menemukan saksi, dikarenakan masyarakat sekitar dan korban kejahatan pencurian dengan kekerasan yang berada di TKP saat kejadian berlangsung tidak memeperhatikan pelaku kejahatan dengan seksama, adapun pelaku kejahatan seringkali menggunakan alat-alat yang menyamarkan identitas seperti penutup wajah, masker, serta menggunakan motor dengan plat palsu sehingga pelaku kejahatan sulit dikenal oleh korban maupun saksi. Yang kedua modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dilakukan secara terorganisir dengan baik, para pelaku sebelum melakukan aksinya biasanya telah melakukan pengamatan atau survey terebih dahulu terhadap korban maupun lokasi yang akan menjadi tempat terjadinya pencurian dengan kekerasan. Yang ketiga korban yang menjadi tindak pidana kekerasan rata-rata mengalami trauma dan sulit untuk dilakukan introgasi menanyakan kejadian yang dialaminya sehingga membuat terhambat menangani sebuah masalah.

1. Faktor internal

Faktor internal yaitu terbatasnya jumlah personil yang khusus menangani kasus pencurian dengan kekerasan, sehingga laporan pencurian dengan kekerasan tidak semua bisa diselesaikan serta penangannya menjadi tidak maksimal dan alat yang digunakan belum memadai dengan kemajuan teknologi yang sekarang, sehingga sulit untuk memecahkan suatu kasus pencurian dengan kekerasan tersebut.[[94]](#footnote-94)

Adapun yang menjadi faktor kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yaitu :

* 1. Korban meninggal dunia

Penyidikan akan dianggap menemui titik gelap atau paling tidak diawali dari titik gelap karena tidak adanya saksi korban sebagai sumber informasi yang mengetahui bagaimana tindak kekerasan yang terjadi dalam tindak pidana pencurian tersebut. Dalam beberapa kasus, tersangka dapat secara nekat dengan sengaja melakukan kekerasan kepada korban hingga diyakininya telah meninggal dunia. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak atau bukti bagi petugas kepolisian yang melakukan penyidikan. Sebagai akibatnya kepolisian akan kesulitan menggungkap perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi. Jika korban meninggal dunia, dan tidak ada saksi lain yang melibat keberadaan orang lain (tersangka) di TKP, maka akan semakin sulit mengarahkan bukti yang ada di TKP kepada orang tertentu. Jika hal ini terjadi, maka pengungkapan kasus akan membutuhkan waktu yang lama, dan bahkan mungkin tidak dapat diungkap sama sekali.

* 1. Pelaku anak dibawah umur

Kepolisian tidak dapat secara langsung melakukan proses hukum kepada tersangka anak hingga ke penuntutan karena adanya UU SPPA yang mengatur bahwa anak sebaiknya tidak dipidana, tetapi lebih mengedepankan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui musyawarah diversi antara keluarga tersangka anak dengan korban, dan dalam hal ini kepolisian mempunyai kewajiban untuk mengupayakan diversi.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan wajib harus terlebih dahulu diupayakan diversi walaupun sebenarnya korbannya telah menderita secara fisik maupun mental. Hal ini tentu menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dimana besar kemungkinan bahwa anak tersebut akan memperoleh diversi dengan menyerahkan anak kepada orang tuanya. Keterlibatan anak di bawah umur sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara tegas, karena terhadap anak tersebut penyidik harus mengedepankan diversi.

* 1. Tersangka mudah melarikan diri

Jika tersangka tidak dapat ditangkap karena sudah melarikan diri, maka penegakan hukum akan terkendala, karena penyidik tidak dapat menyerahkan atau melimpahkan berkas kepada jaksa penuntut umum bersama dengan tersangkanya.

* 1. Pelaku menghilangkan alat bukti

Adannya upaya dari tersangka atau pelaku untuk menghilangkan jejak dengan menghapus atau menghilangkan semua alat bukti yang dapat mengarah kepadanya yang dilakukan pada saat kejadian perkara, akan menyebabkan kesulitan bagi penyidik untuk memperoleh alat bukti yang dapat dihubungkan dengan tersangka. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa korban juga tidak dapat melihat wajah dari tersangka. Dengan tidak adanya pengenalan wajah ataupun sketsa wajah akan membuat penyidik semakin kesulitan menemukan tersangka, dimana pelaku secara sengaja menggunakan penutup kepala pada saat melakukan aksinya. Hal ini akan menyebabkan proses penyidikan menjadi berjalan sangat lambat bahkan mungkin dinyatakan gagal. Upaya pelaku menghilangkan alat bukti secara rapih dan korban juga tidak dapat memberikan ciri-ciri pelaku, maka kasus tersebut kemungkinan akan ditutup tanpa tindak lanjut, karena tidak adanya alat bukti yang dapat diarahkan untuk menangkap pelakunya. Padahal terdapat kemungkinan bahwa pelaku justru berada dan bebas berkeliaran disekitar kediaman korban.[[95]](#footnote-95)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan menurut Bapak Briptu Ridho sebagai anggota penyidik 3 Jatanras Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan salah satunya yaitu :

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pendidikan dapat diperoleh tidak hanya secara formal tetapi juga secara non formal, wawasan mengenai moral maupun akhlak dapat diperoleh untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat serta menanam jiwa Nasionalisme.

Pendidikan mempunyai peran yang penting terhadap pola perilaku masyarakat, terutama berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku, perbuatan ini lebih dikenal dengan istilah tindak pidana, tindak pidana terjadi karena salah satu faktor yaitu kurangnya pendidikan. Tindak Pidana terdiri dalam berbagai macam dan salah satunya adalah tindak pidana pencurian sudah ada sejak zaman dahulu, seiring berkembanya zaman dan teknologi tindak pidana pencurian muncul dengan berbagai macam salah satunya tindak pidana pencurian dengan kekerasan,tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga bisa terjadi karena kurangnya pendidikan.

1. Faktor Ekonomi

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapat tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut, sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

1. Faktor lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian, seseorang yang hidup atau tinggal di didalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.[[96]](#footnote-96)

Sebagaimana halnya penjelasan Bapak Kompol I Putu S sebagai Kanit 3 Unit Jatanras Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bahwasanya kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang mengalami kasus yang cukup tinggi, hampir rata-rata satu hari terjadi 2 sampai dengan 3 kasus pencurian dengan kekerasan.[[97]](#footnote-97)

Adapun data yang diambil dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

**Ta bel 3.1**

**Jumlah Data Pencurian dengan Kekerasan**

**Tahun 2018-2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan** | **Tahun** | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **Januari** | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| **Februari** | 4 | - | 3 | 6 | 1 |
| **Maret** | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| **April** | 1 | 3 | - | 2 | 1 |
| **Mei** | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| **Juni** | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| **Juli** | 4 | 3 | 3 | 2 |  |
| **Agustus** | 2 | 3 | - | 1 |  |
| **September** | 3 | 1 | 2 | 4 |  |
| **Oktober** | 4 | - | - | 1 |  |
| **November** | 3 | - | 4 | 7 |  |
| **Desember** | - | 2 | 5 | 3 |  |
| **Jumlah** | 28 | 18 | 26 | 38 | 15 |

Sumber data diambil tanggal 24 Juni 2022, Unit Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Berdasarkan data diatas, adapun pencegahan terhadap masyarakat pencurian dengan kekerasan yang merupakan bagian dari upaya non penal yang dilakukan oleh Unit 3 Jatanras Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menurut Bapak Briptu Didi Idris sebagai anggota penyidik Unit 3 Jatanras Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan cara :

1. Patroli

Melakukan Patroli rutin oleh unit 3 jatanras, terutama di area yang dianggap rawan salah satunya daerah Soekarno dan sekitarnya.

1. Sosialisasi

Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, baik melalui poster, pamplet, spanduk, media cetak, elektronik maupun media sosial, agar selalu berhati-hati dan tetap waspada saat melintas di jalan-jalan tertentu yang telah diketahui sebagai area rawan pencurian dengan kekerasan. Apabila harus pulang malam, masyarakat diminta untuk melihat situasi dan kondisi jalan yang akan dilalui supayaa tidak menjadi korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di jalan raya. Sosialisasi juga dilakukan ke tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, rumah-rumah, maupun komunitas-komunitas tertentu, untuk meningkatkan ke hati-hatian dan kewaspadaan masyarakat terhadap pencurian dengan kekerasan.

1. Mengefektifkan peran siskamling

Memberikan himbauan agar lingkungan-lingkungan perumahan masyarakat mengaktifkan system keamanan lingkungan (siskamling) dengan membentuk pos-pos keamanan lingkungan (poskamling) di area-area rawan pencurian dengan kekerasan. [[98]](#footnote-98)

Sebagaimana halnya usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum pidana) juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), oleh karenanya kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial *(social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir (tujuan utama) dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.[[99]](#footnote-99)

Sebagaimana dalam hukum pidana bahwasanya menurut *Lawrence M. Friedman* ada 3 aspek penyebab yang mempengaruhi penegakan hukum pidana antara lain yaitu:

* 1. sub sistem substansi hukum (*legal substance*)
  2. sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan
  3. sub sistem budaya hukum (*legal culture*).[[100]](#footnote-100)

Berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka penegakan hukumnya tidak hanya dari faktor penegak hukum itu sendiri melainkan juga dengan faktor masyarakat, karena pada dasarnya pencurian dengan kekerasan sangat memerlukan saksi-saksi dari masyarakat setempat, sehingga tanpa adanya masyarakat yang ingin menjadi saksi maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh unit 3 jatanras Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan ada 2 cara yaitu upaya penal dengan menerapkan hukum pidana atau yang biasa disebut dalam istilah penegakan hukum upaya represif, dengan cara menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365. Kemudian selain upaya penal, karena upaya penal mempunyai kelemahan yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan sub sistem budaya hukum (*legal culture*) maka yang kedua dengan melakukan upaya non penal atau disebut dengan istilah penegak hukum upaya preventif dengan cara melakukan patroli terutama di area yang dianggap rawan, sosialisasi melalui poster, spanduk, elektronik maupun media sosial dan mengefektifkan peran siskamling di lingkungan perumahan masyarakat.

1. **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Pencurian dengan Kekerasan** **Oleh Reserse Kriminal Umum Subdit 3 Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan**

Sebagaimana penjelasan mengenai pencurian dengan kekerasaan menurut Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menurut Hukum Islam kata pencurian dengan kekerasan sering disebut dengan hirabah. Hirabah menurut *Abd Al Qadir Audah* dan *Al Sayid Sabid* dikenal dengan istilah pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan kekerasan dan ini juga disebut dengan Pencurian dengan kekerasan atau begal, walaupunn tindak pidana hirabah dinamakan pencurian besar (Sariwah Kubra), ia tidak benar-benar mirip dengan pencurian, pencurian adalah keluar (rumah) untuk mengambil harta secara paksa. Pendapat yang sama dikemukakan oleh *A.Djazuli* bahwa perbedaan antara pencuri dan perampok (pembegalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pencurian) dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.[[101]](#footnote-101)

Perampokan (hirabah) atau pencurian besar, cakupan pencurian yang meliputi perampokan itu ditinjau dari segi arti majas bukan arti hakikat, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, cakupan makna kata sariqah tidak meliputi perampokan kecuali dengan penjelasan-penjelasan lain, sehingga perampokan disebut dengan pencurian besar, sebab kalau hanya diberi istilah pencurian maka perampokan tidak masuk dalam kata tersebut. Keharusan diberikannya penjelasan termasuk tanda-tanda bahwa kata tersebut masuk dalam kategori majas.[[102]](#footnote-102)

Sehingga perbuatan ini sangat berdampak psikologis bagi korban, sehingga menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar kalau syari'at Islam menghukuminya dengan hukuman yang sangat berat, seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi. Perampokan atau pembegalan sering pula diistilahkan dengan sariqah kubra (pencurian besar).[[103]](#footnote-103)

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hirabah ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Adapun menakuti-nakuti dalam bahasa Arab, Al-Syarbini menyebutnya dengan i’rab.[[104]](#footnote-104)

Al-Qur’an menjelaskan bahwa perampokan itu kejahatan besar, dan hukumannya ditetapkan dalam Surat Al-Ma'idah ayat 33 sebagai berikut:

**إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ**

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.*

Dari ayat di atas, dapat kita lihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan jarimah hirâbah atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman mati dan disalib, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan ke luar wilayah.[[105]](#footnote-105)

dan Surah Al-Ma’idah ayat 38 :

**وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ**

**“***laki-laki dan perempuan yang mencuri harus dipotong tangan, mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka dan sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana ( Al-Maidah ayat 38 )”*

Sebagaimana dalam Jarimah hirabah dapat terjadi dalam berbagai kasus yang pertama, seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh. Yang kedua, seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta yang dimaksud tetapi tidak membunuh. Yang ketiga, seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tapi tidak mengambil harta korban dan yang keempat, seseorang berangkat untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.[[106]](#footnote-106)

Sanksi bagi perampok menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Mereka berargumentasi pada surat al-Maidah ayat 33 di atas dengan memfungsikan huruf ataf aw litanwi artinya perincian.[[107]](#footnote-107) Bila hanya mengambil harta dan membunuh ia dihukum salib, jika ia tidak mengambil harta, tetapi membunuh, ia dihukum bunuh. Jika hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Bila hanya menakut-nakuti, maka dihukum penjara.[[108]](#footnote-108)

Ketentuan sanksi bagi muharib, juga didasarkan pada dialog antara Nabi dengan Malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang hukuman orang yang melakukan hirabah. Jibril menjawab, "Barang siapa yang mengambil harta dan mengacau jalanan, maka potong tangan sebab ia mencuri dan potong kakinya sebab ia mengacau, barang siapa membunuh bunuhlah dan barang siapa membunuh dan mengacau perjalanan saliblah. Barang siapa yang membuat kekacauan tanpa mengambil harta dan membunuh, maka buanglah atau penjarakanlah.[[109]](#footnote-109)

Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, bahwa pencurian dengan kekerasan dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman seperti telah disebut di atas. Perbedaan keempat macam hukuman tersebut merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam hukum pidana positif, perampok dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat.

Dari sini berarti berbeda dengan Hukum Pidana Islam, dalam Hukum Pidana Islam kriteria pencurian dengan kekerasan itu adalah :

1. Dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban
2. dilakukan secara terang-terangan
3. adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Pemindahan barang yang bukan miliknya
5. Kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut

Jadi dalam Hukum Pidana Islam tidak di isyaratkan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, juga tidak di isyaratkan perbuatan mengakibatkan luka kematian. Dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jenis-jenis hukumannya berbeda, sedangkan persamaannya antara versi Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dengan kekerasan.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penegakan hukum bagi pencurian dengan kekerasan Oleh Reserse Kriminal Umum Subdit 3 Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tersebut bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Reserse Kriminal Umum Subdit 3 Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, menegakan amal mahdi dan munkar namun berbeda dengan Hukum Islam. Hukum Islam penegakan hukumnya sesuai dengan syariat Islam dengan cara potong tangan, sedangkan hukum positif dilakukan oleh Reserse Kriminal Umum Subdit 3 Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam menerapkan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan upaya hukum penal dan non penal. Dan Hukum Positif sudah sesuai dengan Hukum Islam karena sama-sama tujuan untuk kemaslahatan.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh unit jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka penulis dalam hal ini dapat menarik kesimpulan sebagai akhir dari penutup pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Reskrimum Subdit 3 Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah : menerapkan upaya hukum penal dengan menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penurian dengan kekerasan dengan ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) Kemudian dengan upaya non penal dengan cara melakukan patroli terutama di area yang dianggap rawan, sosialisasi melalui poster, spanduk, elektronik maupun media sosial dan mengefektifkan peran siskamling di lingkungan perumahan masyarakat.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penegakan hukum pelaku pencurian dengan kekerasan oleh Reskrimum Subdit 3 Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan adalah : bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat namun berbeda dengan Hukum Islam. Hukum Islam penegakan hukumnya sesuai dengan syariat Islam dengan cara potong tangan, sedangkan hukum positif dilakukan oleh Reskrimum Subdit 3 Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam menerapkan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan upaya hukum penal dan non penal . dan Hukum Positif sudah sesuai dengan Hukum Islam karena sama-sama tujuan untuk kemaslahatan.
3. **Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah Sumatera Selatan khususnya Unit 3 Jatanras Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk meningkatkan upaya non penal (upaya preventif) khususnya dalam meningkatkan patroli terutama di area yang dianggap rawan agar mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Dalam hal ini Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk meningkatkan upaya non penal dengan kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya pencurian dengan kekerasan dengan cara bersosialisasi dan mengefektifkan peran siskamling .

**DAFTAR PUSTAKA**

***Al-Qur’an***

**Undang-Undang :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

**Buku :**

ADjazuli. 2004. *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

A.S Alam. 2002*. Kejahatan*,*Penjahat,dan Sistem Pemidanaan.* Makassar: Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin.

Abdoel Djamali. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta : PT Raja Grafindo.

Abdul Rahman. 1983. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam , Hudud dan Kewarisan*. Jakarta : Radja Grafindo.

Adam Chazawi. 2014*. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cet.Ke-1*. Jakarta : Sinar grafika.

Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Andi Hamzah. 1993. *Sistem pidana dan sistem pemidanaan Indonesia.*Jakarta : Pradnya Paramita.

Apriyanto, Ramadhan Kasim. 2019. *Hukum Acara Pidana* : Teori, Asas, dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Malang : Intans Publishing.

Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Bandung : Citra aditia bakti.

Barda Nawawi Arief. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang: Fajar Interpratama.

Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya.

Barda Nawawi Arief, Mulawi.1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung : Alumni.

Buran Bungin. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djisman Samosir, P.A.F Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik.* Bandung:Tarsito.

Djoko Prakoso. 1987. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Bina Aksara.

Dwidja Priyatno. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Eddy O.S Hiariej. 2002*. Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya atma Pustaka.

Fahmi Raghib,Rasyid Ariman. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

H.A.K Moch Anwar. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Cet. 5*, Bandung:Citra Aditya Bakti.

Hambali Thalib. 2009. *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta: Kencana.

Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.

J. Remmelink. 2003. *Hukum Pidana.* Jakarta : Gramedia.

Jazuli. 2008. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Jisman Samosir,Jisman Samosi. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 tahun 1981

Lamintang. 1997. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia.* Bandung : Citra Aditya Bakti.

Lawrence M. Friedman. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa.

M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal.* Jakarta: Sinar Grafika.

Makhrus Munajat. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung.

Makhrus Munajat. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*.Yogyakarta: Teras.

Moeljatno*.* 2002*. Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Moeljatno, S.H.,M.H. 2008. *Asas-asa hukum pidana*. Jakarta : Rineka cipta.

Netra, I.B. 2014. *Statistik Infensia.* Surabaya: Usaha Nasional.

P.A.F. Lamintang. 1987. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Sinar Baru.

P.A.F Lamintang. 1989. Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet.I,. Bandung : Sinar Baru

P.A.F. Lamintang. 1984*. Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung : Amrico.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

R. Tresna. 2015. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Limit.

Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah).* Bandung:Pustaka Setia.

Roeslan Saleh. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara baru.

Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta : Bina Cipta.

Saifuddin Azwar. 2010. *Metode Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bukhari Umar. Ilmu Pendidikan Islam.

Soerjono Soekanto. 2013. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Sofyan Siregar. 2014. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sudikno Mertukusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung:Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2002*. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Teguh Prasetyo.2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, Jakarta.

Teguh Prasetyo.2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*.Yogyakarta: Media Perkasa.

Theo Lamintang, P.A.F. Lamintang. 2020. *Hukum penitensier Indonesia edisi ke dua*, Jakarta : Sinar grafika.

Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.

Wirjono Prodjodikoro.1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

Zainudin Ali. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakrta : Sinar Grafika.

Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Yogyakarta : Deepublish.

**Jurnal :**

Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ Al-Jina'i Al-Islam. 1992. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah.jilid II.

Abdul Wahab Khallaf.1968. *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII.

Basri, Heni Hendrawati dan Yulia, Kurniaty.2015. “*Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”*. Prosiding The 2nd University Reserch Coloquium Universitas Muhammadiah Malang .

Dr. H. M. Nurul Irfan dan M.Ag, Masyrofah, S. Ag., M.Si. 2015. Fiqih Jinayah. Jakarta :Amzah.

Hartono, Toto.2021. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Universitas Darma Agung.

Koesparmono Irsan. 1960. “*Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana*,” Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1, No.1,(2015), Philips. *A First Book English Law* .London : Sweet & Maxwell Ltd.

Muhammad Al-Khathib Al-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj.Beirut: Dar Al-Fikr. jilid IV.

Philips. 1960. A First Book English Law . London : Sweet & Maxwell

Ltd.

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah. Juz 2. Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.

Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil,* Cet. III.Malang:Universitas Muhammadiyah.

Tri Andrisman. 2009. *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung.

Umar Shihab. 2014. Dkk*, Enslklopedia Hukum Pidana Islam.* Bogor : Kharisma Ilmu.

**Skripsi :**

David Chrisna Pangihutan Lumban gaol*.“Analisis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi ( studi putusan nomor 3629/PID.R/2019/PN MDN dan nomor296/PID.B/2020/PN MDN* )” fakultas hukum universitas Sumatera Utara.2021.

Dian Lestari. *Tindak Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan NO.51/ PID.B/2012/PN. SUNGGUMINASA).* Fakultas Syariah dan hukum UIN Alauddin Makasar.2014.

Fitriani. *Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak Persfektif hukum Islam*. Fakultas sayriah dan hukum UIN Alauddin Maksar.2016.

**Sumber Lainnya :**

Bekal Softgun dan Pisau, 5 Perampok di Palembang Ini Rampas Handphone Pemuda: 2 Orang Ditangkap, diperbarui 28 September 2021, diakses 6Januari 2021, Surat Kabar Sumatera Ekpres.

Komplotan Begal di Palembang Ditangkap, 3 Pelaku Masih di Bawah Umur. diterbitkan 6 July 2021, diakses 11 Januari 2022, Surat Kabar Sumatera Ekpres.

Polisi Kejar-kejaran dengan Pelaku Curas, Berhasil Dilumpuhkan. diterbitkan 16 Desember 2021, di Akses 11 Januari 2022, Surat Kabar Sumatera Ekpres.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

* + - * 1. **Identitas Diri**

Nama : Anjeli Deriyanti

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 16 Juli 2000

NIM / Prodi :1820103089 / Hukum Pidana Islam

Alamat Rumah : Jalan Kolonel Sulaiman Amin Perumahan Pemda Km7 Blok B1 No.10 RT. 53 RW. 10 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. 30154

No. Telp / Hp : 082179989959

* + - * 1. **Nama Orang Tua**

Ayah : Rizal

Ibu : Delma Yurniati

* + - * 1. **Pekerjaan Orang Tua**

Ayah : Wirausaha

Ibu : Ibu Rumah Tangga

* + - * 1. **Riwayat Pendidikan**

Sekolah Dasar : SD Negeri 152 Palembang

Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 40 Palembang

Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Palembang

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

* + - * 1. **Prestasi/Penghargaan**

Wakil II Duta Muslim Muslimah FSH 2021

* + - * 1. **Riwayat Oragnisasi**

UKMK PBM ( Ketua Devisi Pemberdayaan Perempuan 2020 )

Senat Mahasiswa (Sema) Fakultas Syar’iah dan Hukum ( Wakil Sema FSH 2021 )

Forum Senat Mahasiswa Syari’ah dan Hukum se-Indonesia ( Ketua Komisi 1 Legilasi & Hukum 2021- 2023 )

Kementerian Pemuda dan Olahraga DEMA UIN RF ( Bendahara Umum 2020 )

HMPS Hukum Pidana Islam FSH ( Ketua Devisi Departemen Seni dan Olahraga 2018 )

Duta Muslim Muslimah Fakultas Syari’ah dan Hukum (Ketua Umum DMM 2021)

Dema Fakultas Syari’ah dan Hukum

Pimpinan Komisaris Perguruan tinggi IPPNU UIN Raden Fatah Palembang

Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama ( IPPNU ) Sumatera Selatan

Himpunan Mahasiswa Syariah Indonesia ( Himsi )

Pergerakan Mahasiswa Islam Indoensia ( PMII )

Palembang,14 Oktober 2022

(Anjeli Deriyanti)

**Lampiran 1**

**Pedoman Wawancara**

**Anggota Kepolisian Jatanras Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan**

**Lampiran I**

Nama : Kompol I Putu Suryawan S.H.,S.Ik

Jabatan : Kanit III Jatanras Reserse Umum

**Pertanyaan :**

1. Apa pendapat bapak mengenai permasalahan pencurian dengan kekerasan ?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh unit jatanras ?
3. Apa faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan dengan kekerasan ?
4. Bagaimana kasus pencurian dengan kekerasan yang ada di kota Palembang ?

**Lampiran II**

Nama : Bripka Bambang S & Aipda Popi Oktarino

Jabatan : Anggota Penyelidik Unit III Jatanras

**Pertanyaan :**

1. Apa pendapat bapak mengenai permasalahan pencurian dengan kekerasan ?
2. Apa tugas dari penyelidikan ?
3. Apa faktor kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
4. Apa sanksi dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?

**Lampiran III**

Nama : Briptu Didi Idris S.E & Briptu Ridho S S.H

Jabatan : Anggota Penyidik Unit III Jatanras

**Pertanyaan :**

1. Apa tugas dari penyidik ?
2. Apa pencegahan yang dilakukan oleh unit jatanras terhadap pencurian dengan dengan kekerasan ?
3. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan ?

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

**Wawancara bersama Kanit 3 Unit Jatanras Reserse Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan**

****

**Wawancara bersama anggota penyidik Subdit 3 Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan**

****

**Wawancara bersama anggota penyelidik Subdit 3 Jatanras**

**Kepolisian Daerah Sumatera Selatan**

****

**Pengambilan Data Kejahatan dengan kekerasan**

****

1. Sekretariat Jenderl Komisi Yudisial Republik Indonesia,*Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, ( Jakarta Pusat : Keramat Raya, 2019 ). 89. [↑](#footnote-ref-1)
2. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 46. [↑](#footnote-ref-2)
3. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2017 ), 3. [↑](#footnote-ref-3)
4. J. Remmelink, *Hukum Pidana,* ( Jakarta : Gramedia, 2003), 14. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa*, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas, dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, ( Malang : Intans Publishing, 2019),1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. ( Jakarta : Bina Cipta,1996),9. [↑](#footnote-ref-6)
7. Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, ( Jakarta : Rineka Cipta,1994),27. [↑](#footnote-ref-7)
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 tahun 1981. [↑](#footnote-ref-9)
10. P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, ( Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 67 [↑](#footnote-ref-10)
11. Basri, Heni Hendrawati dan Yulia, Kurniaty, *“Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”.* Prosiding The 2nd University Reserch Coloquium Universitas Muhammadiah Malang ( 2015 ). [↑](#footnote-ref-11)
12. “Polisi Kejar-kejaran dengan Pelaku Curas, Berhasil Dilumpuhkan”. diterbitkan 16 Desember 2021, di Akses 11 Januari 2022, Surat Kabar Sumatera Ekpres. [↑](#footnote-ref-12)
13. “Komplotan Begal di Palembang Ditangkap, 3 Pelaku Masih di Bawah Umur” diterbitkan 6 July 2021, diakses 11 Januari 2022, Surat Kabar Sumatera Ekpres. [↑](#footnote-ref-13)
14. Bekal Softgun dan Pisau, 5 Perampok di Palembang Ini Rampas Handphone Pemuda: 2 Orang Ditangkap, diperbarui 28 September 2021, diakses 6Januari 2021, Surat Kabar Sumatera Ekpres. [↑](#footnote-ref-14)
15. Hartono, Toto., *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan ( Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan ).* Universitas Darma Agung ( 2021 ). [↑](#footnote-ref-15)
16. Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah disertai Tafsir ringkas Ibnu Katsir*, (Bandung: Jabal Raudhotul Jannah,200),144. [↑](#footnote-ref-16)
17. Dr. H. M. Nurul Irfan dan M.Ag, Masyrofah, S. Ag., M.Si, *Fiqih Jinayah*, ( Jakarta :Amzah,2015),99-100. [↑](#footnote-ref-17)
18. Dr. H. M. Nurul Irfan dan M.Ag, Masyrofah, S. Ag., M.Si, *Fiqih Jinayah*,100-101. [↑](#footnote-ref-18)
19. Fitriani. *“Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak Persfektif Hukum Islam*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar,2016. [↑](#footnote-ref-19)
20. David Charisna Panghutan Lumabn Gaol. “Analisis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Persfektif Kriminologi ( Studi Putusan Nomor 3629/PID.R/2019/PN.MDN dan Nomor 296/PID.B/2020/PN MDN)”. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Selatan,2021. [↑](#footnote-ref-20)
21. Dian Lestari. “Tindak Pencurian dengan Kekerasan ( Studi Putusan No.51/PID.B/PN.SUNGGUMINASA)”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar,2014. [↑](#footnote-ref-21)
22. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: UI Press,2013), 3. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sofyan Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif,* ( Jakarta: Bumi Aksara,2014),14-15. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif.* ( Bandung: Alfabeta,2018),456. [↑](#footnote-ref-24)
25. Sugiyono*. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, ( Bandung : Alfabeta,2016),62. [↑](#footnote-ref-25)
26. Netra, I.B. *Statistik Infensia,* (Surabaya: Usaha Nasional, 2014) ,72. [↑](#footnote-ref-26)
27. Buran Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: Rajawali Pers,2010),52. [↑](#footnote-ref-27)
28. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta,2002),132. [↑](#footnote-ref-28)
29. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*,( Bandung:Alfabeta,2012), 32. [↑](#footnote-ref-29)
30. Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian* . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bukhari Umar. Ilmu Pendidikan Islam,2010),56. [↑](#footnote-ref-30)
31. Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. ( Yogyakarta : Genta Publishing,2009),25. [↑](#footnote-ref-31)
32. Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 1990),58. [↑](#footnote-ref-32)
33. Sudikno Mertukusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998),168. [↑](#footnote-ref-33)
34. Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013),54. [↑](#footnote-ref-34)
35. Moeljatno, S.H.,M.H., *Asas-asa hukum pidana*,(Jakarta : Rineka cipt, 2008),4. [↑](#footnote-ref-35)
36. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997),3. [↑](#footnote-ref-36)
37. Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia,* (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2009), 8. [↑](#footnote-ref-37)
38. P.A.F. Lamintang. *Hukum Penintensier Indonesia*. ( Bandung : Amrico.1984),34. [↑](#footnote-ref-38)
39. Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* (Bandung : Alumni, 1998 ) ,2. [↑](#footnote-ref-39)
40. Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, 1. [↑](#footnote-ref-40)
41. Jan Remmelink, *Hukum Pidana*,7. [↑](#footnote-ref-41)
42. Barda Nawawi Arief, *Kapita selekta hukum pidana* , ( Bandung : PT. Citra Aditya,2003), 136. [↑](#footnote-ref-42)
43. Andi Hamzah, *Sistem pidana dan sistem pemidanaan Indonesia*, ( Jakarta : Pradnya Paramita, 1993 ), 9. [↑](#footnote-ref-43)
44. J . Remmelink, *Hukum Pidana*,14. [↑](#footnote-ref-44)
45. Andi Hamzah, *Hukum pidana Indonesia*, 27-28. [↑](#footnote-ref-45)
46. Philips, *A First Book English Law ,* ( London : Sweet & Maxwell Ltd.,1960),218. [↑](#footnote-ref-46)
47. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,10. [↑](#footnote-ref-47)
48. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*,( Jakarta: Rajawali Press, Jakarta, 2010), 7. [↑](#footnote-ref-48)
49. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum penitensier Indonesia edisi ke dua*,

    ( Jakarta : Sinar grafika,2020),11. [↑](#footnote-ref-49)
50. Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana,* ( Bandung : Citra aditia bakti,1996), 22. [↑](#footnote-ref-50)
51. Wirjono Prodjodikoro*, Hukum Acara Pidana di Indonesia*,( Bandung: Sumur Bandung, Bandung, 1981), 16. [↑](#footnote-ref-51)
52. Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Kencana, 2009),13. [↑](#footnote-ref-52)
53. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 118. [↑](#footnote-ref-53)
54. Djoko Prakoso*, Masalah Pidana Mati*,( Jakarta: Bina Aksara, 1987), 25. [↑](#footnote-ref-54)
55. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 120. [↑](#footnote-ref-55)
56. Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di indonesia*, ( Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 71. [↑](#footnote-ref-56)
57. M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 229. [↑](#footnote-ref-57)
58. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*,( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012),189 [↑](#footnote-ref-58)
59. Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 20. [↑](#footnote-ref-59)
60. Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*,18. [↑](#footnote-ref-60)
61. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, ( Malang: Setara Press, 2016),303. [↑](#footnote-ref-61)
62. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, 305. [↑](#footnote-ref-62)
63. Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ( Yogyakarta : Deepublish,2017), 39. [↑](#footnote-ref-63)
64. Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada,2014),68. [↑](#footnote-ref-64)
65. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara,2005), 22. [↑](#footnote-ref-65)
66. Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*,(Jakarta: Aksara baru,2003), 53. [↑](#footnote-ref-66)
67. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, 49 [↑](#footnote-ref-67)
68. P.A.F. Lamintang*, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,

    ( Bandung : Sinar Baru,1987), 172. [↑](#footnote-ref-68)
69. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Eresco,1986), 55. [↑](#footnote-ref-69)
70. H.A.K Moch Anwar*, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II*), Cet. 5, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1989), 25 [↑](#footnote-ref-70)
71. A.S Alam, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan,* ( Makassar : Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin,2002), 1. [↑](#footnote-ref-71)
72. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002),54 [↑](#footnote-ref-72)
73. P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet.I, (Bandung : Sinar Baru,1989), 11. [↑](#footnote-ref-73)
74. P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, ( Bandung:Tarsito, 1990),50. [↑](#footnote-ref-74)
75. Tongat, *Hukum Pidana Materiil,* Cet. III,( Malang:Universitas Muhammadiyah,2006) ,19-23. [↑](#footnote-ref-75)
76. Mahrus, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet.Ke-1. ( Jakarta : Sinar grafika,2011), 193. [↑](#footnote-ref-76)
77. Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) [↑](#footnote-ref-77)
78. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968, 11. [↑](#footnote-ref-78)
79. Umar Shihab, Dkk,*Ensklopedia Hukum Pidana Islam*,(Bogor : Kharisma Ilmu,2017), 77 [↑](#footnote-ref-79)
80. Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam, (* Jakrta : Sinar Grafika) 2012 ), 69 [↑](#footnote-ref-80)
81. Abdul Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam , Hudud dan Kewarisan*, ( Jakarta : Radja Grafindo,1404 H), 33 [↑](#footnote-ref-81)
82. Umar Shihab, Dkk, *Enslklopedia Hukum Pidana Islam*,( Bogor : Kharisma Ilmu,2014)

    , 77. [↑](#footnote-ref-82)
83. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada,2008), 89-90. [↑](#footnote-ref-83)
84. Buku Pedoman Polda Sumsel [↑](#footnote-ref-84)
85. Buku Pedoman Pold Sumsel [↑](#footnote-ref-85)
86. Sumber Data:Renim Subdit III Jatanras, 2022. [↑](#footnote-ref-86)
87. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011),45. [↑](#footnote-ref-87)
88. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 72. [↑](#footnote-ref-88)
89. Hasil wawancara dengan Kanit 3 unit jatanras di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Pada Tanggal 16 Juni 2022, Waktu 08.30 WIB [↑](#footnote-ref-89)
90. Hasil wawancara dengan anggota unit jatanras bagian penyidik di Kepolisidan Daerah Sumatera Selatan. Pada Tanggal 16 Juni 2022, Waktu 08.30 WIB [↑](#footnote-ref-90)
91. Hasil wawancara dengan Kanit 3 unit jatanras di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Pada Tanggal 16 Juni 2022, Waktu 08.30 WIB [↑](#footnote-ref-91)
92. Hasil wawancara dengan anggota unit lidik jatanras di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Pada Tanggal 16 Juni 2022, Waktu 09.00 WIB [↑](#footnote-ref-92)
93. Hasil wawancara dengan anggota penyelidik Direskrimum Unit jatanras di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Pada Tanggal 24 Juni 2022, Waktu 09.30 WIB [↑](#footnote-ref-93)
94. Hasil wawancara dengan Kanit 3 unit jatanras di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Pada Tanggal 16 Juni 2022, Waktu 08.30 WIB [↑](#footnote-ref-94)
95. Hasil wawancara dengan Kanit 3 unit jatanras di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Pada Tanggal 16 Juni 2022, Waktu 08.30 WIB [↑](#footnote-ref-95)
96. Hasil wawancara dengan Kanit Subit 3 unit jatanras di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Pada Tanggal 16 Juni 2022, Waktu 08.30 WIB [↑](#footnote-ref-96)
97. Hasil wawancara dengan Kanit 3 unit jatanras di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Pada Tanggal 16 Juni 2022, Waktu 08.30 WIB [↑](#footnote-ref-97)
98. Hasil wawancara dengan Anggota bagian Penyidik unit jatanras di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Pada Tanggal 28 Juni 2022, Waktu 08.30 WIB [↑](#footnote-ref-98)
99. Koesparmono Irsan, “*Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana*,” Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1, No.1,(2015), 80 [↑](#footnote-ref-99)
100. Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001),6-8 [↑](#footnote-ref-100)
101. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 86. [↑](#footnote-ref-101)
102. Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ Al-Jina'i Al-Islam, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), jilid II. 638. [↑](#footnote-ref-102)
103. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 88 [↑](#footnote-ref-103)
104. Muhammad Al-Khathib Al-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, (Beirut: Dar Al-Fikr), jilid IV, 180. [↑](#footnote-ref-104)
105. Fuad Thohari, Hadis Ahkam : Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam ( Hudud, Qishash dan Ta’zir ( Yogyakarta : Deepublish,2018),81. [↑](#footnote-ref-105)
106. Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*,

     ( Yogyakarta: Logung, 2004 ), 117. [↑](#footnote-ref-106)
107. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, 400. [↑](#footnote-ref-107)
108. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 2, 401. [↑](#footnote-ref-108)
109. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*,( Yogyakarta: Teras, 2009), 155. [↑](#footnote-ref-109)